

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jambi adalah salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia, yang terletak dibagian tengah pulau Sumatera yang mempunyai bentangan wilayah mulai dari daerah pegunungan dibagian barat dataran tinggi, dibagian tengah dataran rendah sampai pasang surut dibagian timur, dan wilayah perairan yang bermuara hingga kepulauan Berhala. Kawasan Timur Provinsi Jambi merupakan wilayah paling strategis bagi sektor perdagangan, karena berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan dan Samudera Pasifik sebagai lintas arus perdagangan Internasional.

Secara geografis Provinsi Jambi terletak antara 0° 45' Lintang Utara sampai dengan 2° 45' Lintang Selatan dan 101°10'104°55' Bujur Timur membujur dari Pantai Timur Pulau Sumatera kearah barat berada pada posisi yang strategis yang berhubungan langsung dengan kawasan pertumbuhan regional seperti Singapore, Malaysia dan Thailand. Dalam kerjasama perekonomian, Indonesia dengan Negara-negara tersebut telah membentuk kawasan segitiga pertumbuhan, baik Indonesia, Malaysia, Singapore Growth Triangle (IMS-GT) maupun Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle (IMT-GT)

Luas wilayah Provinsi Jambi adalah 53.435,72 Km² yang terdiri atas luas daratan 51.000 Km² , luas lautan 44.496 Km² dengan panjang garis pantai 210 Km Secara administratif Provinsi Jambi terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan penduduk pada tahun 2010 mencapai 3.092.265 jiwa . Dengan bentuk geografis bervariasi, maka Provinsi Jambi mempunyai sumber daya alam yang beragam pula diantaranya pada Sektor Perkebunan.

Berdasarkan fakta di atas, perlu dilakukan pengkajian tentang pentingnya membangun strategi pengembangan komoditi kelapa sawit pada subsektor perkebunan. Dengan harapan agar subsektor

perkebunan selain dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan perekonomian Provinsi Jambi, juga dapat menjadi lapangan pekerjaan yang bersifat turun temurun atau berkelanjutan, yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya,

1.2 Tujuan dan Output

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi yang berkaitan dengan kondisi eksisting subsektor perkebunan kelapa sawit yang ada.
2. Tersusunya suatu model untuk dijadikan strategi dalam pengembangan komoditi kelapa sawit yang berkelanjutan .
3. Tersosialisasikannya berbagai strategi dalam pengembangan komoditi kelapa sawit di Provinsi Jambi.

1.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan ini sebagai dasar dan bahan dalam :

1. Memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan dalam pengembangan komoditi kelapa sawit yang berkelanjutan, dalam konteks mempertahankan usaha perkebunan, dengan tetap menjadi kelestarian lingkungan.
2. Meningkatkan daya saing (*competitiveness*) komoditi kelapa sawit, guna menghadapi persaingan pasar bebas, serta mengkonter kampanye negatif (*black campagne*), yang menyudutkan bahwa pengembangan sektor perkebunan mengancam kelestarian hutan.
3. Memberikan nilai manfaat yang lebih berkeadilan, terutama bagi para petani dan masyarakat, yang bermukim di sekitar areal perkebunan, yang selama ini mereka hanya sebagai buruh dari suatu perusahaan perkebunan.

II. PERKEBUNAN DI PROVINSI JAMBI.

2.1. Pengertian Perkebunan.

Perkebunan memiliki arti kegiatan menanami tanah dengan tanaman yang nantinya menghasilkan suatu yang dapat dipanen, dan kegiatan Perkebunan merupakan campur tangan manusia terhadap tumbuhan asli dan daur hidupnya. Dalam Perkebunan modern campur tangan ini semakin jauh dalam bentuk masukan bahan kimia Perkebunan, termasuk: pupuk kimia, pestisida dan bahan pembenah tanah lainnya. Bahan-bahan tersebut mempunyai peranan yang cukup besar dalam meningkatkan produksi tanaman. Akan tetapi dua istilah "Perkebunan alami" dan "Perkebunan organik"

Istilah yang pertama "Perkebunan alami" mengisyaratkan kekuatan alam mampu mengatur pertumbuhan tanaman, sedang campur tangan manusia tidak diperlukan sama sekali. Istilah yang kedua "Perkebunan organik" campur tangan manusia lebih insentif untuk memanfaatkan lahan dan berusaha meningkatkan hasil berdasarkan prinsip daur-ulang yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi setempat

Perkebunan adalah salah satu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ada anggapan bahwa asal mula Perkebunan di dunia dimulai dari asia tenggara. Awal kegiatan Perkebunan terjadi ketika manusia mulai mengambil panenan dalam proses kegiatan tanaman dan hewan serta pengaturannya untuk memenuhi kebutuhan. Tingkat kemajuan Perkebunan mulai dari pengumpulan da pemburu, Perkebunan primitive, Perkebunan tradisional, dan Perkebunan modern.

Sedangkan Perkebunan dalam arti luas yaitu semua kegiatan usaha dalam reproduksi fauna dan flora tersebut, yang dibedakan ke dalam 5 sektor, masing-masing Perkebunan rakyat, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Dalam arti sempit yaitu khusus Perkebunan rakyat.

Perkebunan merupakan bagian agroekosistem yang tak terpisahkan dengan subsistem kesehatan dan lingkungan alam, manusia dan budaya saling mengait dalam suatu proses produksi untuk kelangsungan hidup bersama.

2.2. Perkebunan di Provinsi Jambi.

Perkebunan di wilayah Provinsi Jambi pada umumnya adalah Perkebunan Rakyat. Produksi perkebunan rakyat yang terbesar adalah karet memiliki luas tanaman 663.981 hektar dengan produksi 333.168 ton pada tahun 2016. Komoditas andalan lainnya yaitu kelapa sawit dalam 1.032.171 ton. Sub sektor Perkebunan merupakan salah satu sektor yang cukup potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Provinsi Jambi.

Sampai saat ini, perkembangan perekonomian Provinsi Jambi sangat bertumpu pada kemampuan mengeksploitasi sumberdaya alam yang dimilikinya. Terdapat beberapa potensi sumberdaya alam yang belum dikembangkan secara optimal, baik dilihat dari aspek pemanfaatannya bagi pembangunan daerah wilayah maupun dilihat dari aspek pembangunan yang berkelanjutan. Sumberdaya alam utama adalah tanah/lahan yang potensial untuk perkembangan Perkebunan pangan dan hortikultur, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Dari 5.100.000 ha luas daratan, seluas 2.179.440 ha (42.73 %) adalah kawasan hutan dan kawasan Perkebunan, dan non Perkebunan seluas 2.920.560 ha (52,27 %).

Tabel 2.1 Penggunaan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2013

Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase
Lahan Permukiman	49.631	1,01
Sawah Tadah Hujan	126.662	2,58
Tegalan/Ladang	117.516	2,40
Kebun Campuran	112.787	2,30
Kebun Karet	1.284.003	26,20
Kebun Sawit	941.565	19,22
Kebun Kulit Manis	93.609	1,91
Kebun Teh	4.691	0,10
Semak dan alang-alang	87.177	1,78
Hutan Lebat	1.433.470	29,25
Hutan Belukar	413.406	8,44
Hutan Sejenis	187.704	3,83
Lain-lain	47.757	0,97
Jumlah	4.899.978	100,00

Sumber: RTRWP Jambi Tahun 2013 - 2033

Perkebunan sebagai potensi ekonomi utama provinsi jambi hingga saat ini semakin menunjukkan peranan yang penting. Komoditi utama perkebunan pada tahun 1999 meliputi perkebunan karet (552.518 ha), kelapa sawit (244.353 ha), cassiavera (59.498 ha) dan kopi (27.190 ha)

Karet sebagai tanaman utama dan dikenal sejak lama oleh masyarakat, kondisinya tidak menguntungkan selain cenderung menjadi hitan karet, produktivitasnya rendah kurang lebih 700 kg/ha/tahun juga mutu olah karet ralyat yang rendah. Hal yang sama dialami pula oleh kelapa rakyat selain produktivitasnya rendah juga membutuhkan peremajaan lebih lanjut.

Perkebunan kelapa sawit meskipun sebagian besar belum memproduksi tetapi menunjukkan perkembangan yang tinggi dan

mengarah pada komoditi perkebunan utama. Peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit secara ekonomis mendukung industri pengolahan lanjutan CPO dan barang ikutan lainnya menjadi barang jadi, perlu dipikirkan. Begitu pula komoditi cassievera provinsi jambi dengan kemmapuan produksi 35.000 ton/tahun termasuk pemasok terbesar komoditi Indonesia di pasar internasional.

Kehutanan sebagai bidang kewenangan provinsi hingga saat ini memberikan kontribusi yang sangat domininan terhadap ekspor Jambi. Tahun 1999 terdapat 23 perusahaan areal hutan, terdiri dari 14 hak perusahaan hutan (hph) seluas 1.037.157 ha dan 9 hak perusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) seluas 349.408 ha. Selain itu 1.393.00 ha yang merupakan eks HPH telah dikelola oleh INHUTANI dan 341.305 ha diserahkan kepada pemerintah. Selain hutan produksi, terdapat pula 870.250 ha kawasan hutan konservasi di berbagai kabupaten dengan beragam status antara lain Taman Nasional Kerinci Seblat, Bukit Tigapuluh, Hutan Lindung dan Lindung Gambut. Kawasan tersebut merupakan sumber keanekaragaman hayati baik fauna maupun flora serta sebagai kawasan pariwisata.



Gambar 2.1: Bibit Kelapa Sawit di tempat persemaian

Salah satu upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah adalah melalui peningkatan investasi. Secara keseluruhan nilai investasi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Jambi sebesar Rp. 5,5 Trilyun dari 89 PMDN. Rencana investasi PMDN di Jambi sebesar Rp. 25.943.386 dan yang sudah terealisasi sebesar Rp. 5.595.854,-. Sementara nilai investasi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US\$ 223.457,74 dari 15 PMA dan yang sudah terealisasi sebesar US\$ 11.755,0,-.

Tabel 2.2: Luas Tanaman Unggulan Perkebunan menurut Jenis Tanaman di Provinsi Jambi tahun 2017

No	Jenis Tanaman	Luas (Ha)	RTP (Rumah Tangga Petani)
1	Karet / <i>Rubber</i>	665 334	263 335
2	Kelapa Sawit / <i>Oil Palm</i>	476 413	211 226
3	Kelapa Dalam / <i>Coconut</i>	118 543	95 779
4	Kulit Kayu Manis / <i>Cassia vera</i>	46 132	17 514
5	Kopi / <i>Coffee</i>	26 847	26 906
6	Coklat / <i>Cocoa</i>	2 354	5 895
7	Pinang / <i>Areca Nut</i>	20 694	28 497

Sumber: BPS Provinsi Jambi tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada 7 komoditi unggulan perkebunan di Provinsi Jambi. Penentuan katagori komoditi unggulan tersebut berdasarkan tingginya luas wilayah dan banyak jumlah rumah tangga petani yang terlibat dalam kegiatan usaha perkebunan tersebut. Dari Tabel yang tertera di atas, juga dapat disimpulkan bahwa komoditi karet masih merupakan komoditi yang memberikan kontribusi terbesar, baik dari luas tanaman maupun jumlah rumah tangga petani.



Gambar 2.2: Hamparan perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi

Adapun komoditi yang menempati urutan runner up, yaitu komoditi kelapa sawit. Namun ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan, dalam pola penguasaan lahannya. Dimana komoditi karet, banyak dikuasai oleh perorangan (masyarakat), sedangkan komoditi kepala sawit, banyak dikuasai oleh korporasi (perusahaan) dengan pola Hak Guna Usaha.



Gambar 2.3: Kondisi perkebunan kelapa sawit yang sudah tua..

2.3. Permasalahan Dasar Perkebunan

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam usaha perkebunan, di Provinsi Jambi, pada umumnya hampir sama seperti permasalahan yang terjadi di Provinsi tetangga, diantaranya.

1. Bibit tanaman masih ada yang palsu.

Para petani perlu waspada, mengingat di pasaran masih ada sebagian bibit tanaman perkebunan, yang dihasilkan tidak sesuai dengan ketentuan standar. Hal ini sangat merugikan para petani, mengingat tanaman yang pelihara, tingkat pertumbuhan sangat lambat, sementara produktivitas buahnya sangat sedikit.

2. Pemupukan kurang

Pemupukan yang kurang tepat dengan jumlah yang tidak sesuai anjuran, maka tanaman perkebunan akan sulit menghasilkan produktivitas hasil panen seperti yang diharapkan.

3. Lahan tidak sesuai

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan, akan menghambat tumbuh dan berkembangnya tanaman perkebunan. Sebagai contoh masih ada para petani yang memaksakan diri, menanam tanaman perkebunannya di lahan bergambut.

4. Kurangnya pengetahuan petani

Pada umumnya para petani tidak memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, dalam mengelola usaha budidaya perkebunannya. Mereka hanya mendapat informasi, dari sesama para petani, yang sebagian besar belum berdasarkan kajian ilmiah.

5. Banyak tanaman tua

Tanaman perkebunan yang sudah tua, akan mengalami penurunan produktivitas. Sementara untuk melakukan peremajaan (replanting), para petani tidak memiliki biaya yang cukup.

III. STRATEGI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

3.1. Perkebunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka”. Dengan demikian Pembangunan berkelanjutan juga memiliki makna pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestaraan lingkungan yang tidak terjaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang.



Gambar 3.1: Kondisi alam Provinsi Jambi yang didominasi perkebunan

Sedangkan Perkebunan Berkelanjutan merupakan keberhasilan dalam mengelola sumberdaya untuk kepentingan pertanian dalam memenuhi kebutuhan manusia, sekaligus mempertahankan dan

meningkatkan kualitas lingkungan serta konservasi sumberdaya alam. Perkebunan berwawasan lingkungan selalu memperhatikan nasabah tanah, air, manusia, hewan/ternak, makanan, pendapatan dan kesehatan. Sedang tujuan Perkebunan yang berwawasan lingkungan adalah mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah; meningkatkan dan mempertahankan hasil pada aras yang optimal; mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem; dan yang lebih penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan penduduk dan makhluk hidup lainnya. Sistem Perkebunan berkelanjutan harus dievaluasi berdasarkan pertimbangan beberapa kriteria, antara lain:

1. **Aman Bagi lingkungan,**

Hal ini berarti kualitas sumberdaya alam dan faktor pendukung agroekosistem tetap dipertahankan, mulai dari kehidupan manusia, tanaman dan hewan sampai organisme tanah dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dicapai apabila tanah dikelola dengan baik, kesehatan tanah dan tanaman ditingkatkan, demikian juga kehidupan manusia maupun hewan ditingkatkan melalui proses biologi. Sumberdaya lokal dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya kehilangan hara, biomassa dan energi, dan menghindarkan terjadinya polusi. Menitikberatkan pada pemanfaatan sumberdaya terbarukan.

2. **Menguntungkan secara ekonomi.**

Mengindikasikan bahwa petani dapat menghasilkan sesuatu yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan cukup memperoleh pendapatan untuk membayar buruh dan biaya produksi lainnya. Keuntungan menurut ukuran ekonomi tidak hanya diukur langsung berdasarkan hasil usaha taninya, tetapi juga berdasarkan fungsi

kelestarian sumberdaya dan menekan kemungkinan resiko yang terjadi terhadap lingkungan.

3. Adil menurut pertimbangan sosial.

Hal tersebut berarti sumberdaya dan tenaga tersebar sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar semua anggota masyarakat dapat terpenuhi, demikian juga setiap petani mempunyai kesempatan yang sama dalam memanfaatkan lahan, memperoleh modal cukup, bantuan teknik dan memasarkan hasil. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama berpartisipasi dalam menentukan kebijakan, baik di lapangan maupun dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

4. Manusiawi terhadap semua bentuk kehidupan,

Hal ini memiliki pengertian tanggap terhadap semua bentuk kehidupan (tanaman, hewan dan manusia) prinsip dasar semua bentuk kehidupan adalah saling mengenal dan hubungan kerja sama antar makhluk hidup adalah kebenaran, kejujuran, percaya diri, kerja sama dan saling membantu. Integritas budaya dan agama dari suatu masyarakat perlu dipertahankan dan dilestarikan.

5. Dapat dengan mudah diadaptasi.

Berarti masyarakat pedesaan/petani mampu dalam menyesuaikan dengan perubahan kondisi usahatani: penambahan penduduk, kebijakan dan permintaan pasar. Hal ini tidak hanya berhubungan dengan masalah perkembangan teknologi yang sepadan, tetapi termasuk juga inovasi sosial dan budaya.

Suatu konsensus telah dikembangkan untuk mengantisipasi Perkebunan berkelanjutan. Sistem produksi yang dikembangkan berdasarkan LEISA (*Low External Input Sustainable Agriculture*) yang kalau diterjemahkan sebagai (Perkebunan Berkelanjutan/Lestari, Masukan Dari Luar Usahatani Rendah). Konsep ini dapat dijabarkan

menjadi beberapa rakitan operasional, antara lain: meningkatkan produktivitas, melaksanakan konservasi energi dan sumberdaya alam, mencegah terjadinya erosi dan membatasi kehilangan unsur hara, meningkatkan keuntungan usahatani, memantapkan dan ketenlanjutan konservasi serta sistem produksi Perkebunan.

Konservasi merupakan faktor yang penting dalam Perkebunan berwawasan lingkungan. Konservasi sumberdaya terbarukan berarti sumberdaya tersebut harus dapat difungsikan secara berkelanjutan (continuous). Sekarang kita sudah mulai sadar tentang potensi teknologi, kerapuhan lingkungan, dan kemampuan budi daya manusia untuk merusak lingkungan tersebut. Suatu hal yang perlu dicatat bahwa ketersediaan sumberdaya adalah terbatas.



Gambar 3.2: Wilayah konservasi yang berada Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

Pada dasarnya konservasi lahan diarahkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hidrologis, menjaga

kelestarian sumber air, meningkatkan sumber daya alam serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang pada gilirannya meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui usaha tani yang berkelanjutan.

Pola usaha tani konservasi merupakan suatu bentuk pengusahaan lahan yang mengkombinasikan teknik konservasi secara mekanik/sipil teknik, vegetatif maupun kimiawi.

Metode mekanik/sipil teknik, suatu bentuk metode konservasi tanah dengan menggunakan sarana fisik (tanah, batu dan lain-lain) sebagai sarana bangunan konservasi tanah. Metode ini berfungsi untuk: a). memperlambat aliran permukaan, b). menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak. Beberapa cara yang diajarkan: (1) pengolahan tanah minimum, (2) pengolahan tanah menurut kontur, (3) pembuatan guludan dan teras, (4) pembuatan terjunan air, (5) pembuatan rorak / saluran buntu.

Metode Vegetatif: suatu metode konservasi tanah dengan menggunakan tanaman atau tumbuhan dan seresah untuk mengurangi daya rusak hujan yang jatuh, mengurangi jumlah dan daya rusak aliran permukaan erosi. Metode ini berfungsi :

- a. Melindungi tanah terhadap daya rusak butir-butir hujan yang jatuh,
- b. Melindungi tanah terhadap daya perusakan aliran air,
- c. Memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah dan penahan air yang mempengaruhi besarnya aliran permukaan,
- d. Memperbaiki struktur dan kesuburan tanah.

Beberapa cara yang digunakan: sistem pertanaman lorong, strip rumput, tanaman penutup tanah, teras gulud, teras bangku, rorak, embung, mulsa, dan dam parit.

Sedangkan metode kimia dimaksudkan untuk memperbaiki struktur tanah melalui pemberian bahan kimia tanah (*soil Conditioner*).

3.2. Perkebunan Organik Tradisional

Perkebunan ramah lingkungan salah satunya adalah dengan menerapkan Perkebunan organik. Perkebunan organik adalah sistem manajemen produksi terpadu yang menghindari penggunaan pupuk buatan, pestisida dan hasil rekayasa genetik, menekan pencemaran udara, tanah, dan air. Di sisi lain, Perkebunan organik meningkatkan kesehatan dan produktivitas di antara flora, fauna dan manusia. Penggunaan masukan di luar Perkebunan yang menyebabkan degradasi sumber daya alam tidak dapat dikategorikan sebagai Perkebunan organik. Sebaiknya, sistem Perkebunan yang tidak menggunakan masukan dari luar, namun mengikuti aturan Perkebunan organik dapat masuk dalam kelompok Perkebunan organik, meskipun agro-ekosistemnya tidak mendapat sertifikasi organik. Bila kita sepenuhnya mengacu kepada terminologi (Perkebunan organik natural) ini tentunya sangatlah sulit bagi petani untuk menerapkannya, oleh karena itu pilihan yang dilakukan adalah melakukan Perkebunan organik regeneratif, yaitu Perkebunan dengan prinsip Perkebunan disertai dengan pengembalian ke alam masukan-masukan yang berasal dari bahan organik.

Pengelolaan Perkebunan yang berwawasan lingkungan dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, lestari dan menguntungkan, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Pemilihan komoditas dan areal usaha yang cocok merupakan kunci dalam pelaksanaan pembangunan Perkebunan berkelanjutan, komoditas harus yang menguntungkan secara ekonomis, masyarakat sudah terbiasa membudidayakannya, dan

dibudidayakan pada lahan yang tidak bermasalah dari segi teknis, ekologis dan menguntungkan secara ekonomis.

Beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk pengembangan agribisnis hortikultura (terutama lahan dan air) secara lestari sesuai dengan kemampuan dan daya dukung alam,
- b. Proses produksi atau kegiatan usahatani itu sendiri dilakukan secara akrab lingkungan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dan eksternalitas pada masyarakat,
- c. Penanganan dan pengolahan hasil, distribusi dan pemasaran, serta pemanfaatan produk tidak menimbulkan masalah pada lingkungan (limbah dan sampah),
- d. Produk yang dihasilkan harus menguntungkan secara bisnis, memenuhi preferensi konsumen dan aman konsumsi. Keadaan dan perkembangan permintaan dan pasar merupakan acuan dalam agribisnis hortikultura ini.

3.3. Konsep Perkebunan Organik Modern.

Perkebunan organik modern masuk dalam sistem Perkebunan Indonesia secara sporadis dan kecil-kecilan. Perkebunan organik modern berkembang memproduksi bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan sistem produksi yang ramah lingkungan. Tetapi secara umum konsep Perkebunan organik modern belum banyak dikenal dan masih banyak dipertanyakan. Penekanan sementara ini lebih kepada meninggalkan pemakaian pestisida sintetis. Dengan makin berkembangnya pengetahuan dan teknologi kesehatan, lingkungan hidup, mikrobiologi, kimia, molekuler biologi, biokimia dan lain-lain, Perkebunan organik terus berkembang.

Dalam sistem Perkebunan organik modern diperlukan standar mutu dan ini diberlakukan oleh negara-negara pengimpor dengan

sangat ketat. Sering satu produk Perkebunan organik harus dikembalikan ke negara pengekspor termasuk ke Indonesia karena masih ditemukan kandungan residu pestisida maupun bahan kimia lainnya.

Banyaknya produk-produk yang mengklaim sebagai produk Perkebunan organik yang tidak disertifikasi membuat keraguan di pihak konsumen. Sertifikasi produk Perkebunan organik dapat dibagi menjadi dua kriteria yaitu:

1. Sertifikasi Lokal untuk pangsa pasar dalam negeri.

Kegiatan Perkebunan ini masih mentoleransi penggunaan pupuk kimia sintetis dalam jumlah yang minimal atau Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA), namun sudah sangat membatasi penggunaan pestisida sintetis. Pengendalian OPT dengan menggunakan biopestisida, varietas toleran, maupun agensia hayati. Tim untuk merumuskan sertifikasi nasional sudah dibentuk oleh Departemen Perkebunan dengan melibatkan perguruan tinggi dan pihak-pihak lain yang terkait.

- 2. Sertifikasi Internasional untuk pangsa ekspor** dan kalangan tertentu di dalam negeri, seperti misalnya sertifikasi yang dikeluarkan oleh SKAL ataupun IFOAM. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain masa konversi lahan, tempat penyimpanan produk organik, bibit, pupuk dan pestisida serta pengolahan hasilnya harus memenuhi persyaratan tertentu sebagai produk Perkebunan organik.

Menghadapi era perdagangan bebas pada tahun 2010 mendatang diharapkan Perkebunan organik Indonesia sudah dapat mengekspor produknya ke pasar internasional. Komoditas Perkebunan organik yang akan dikembangkan dan memiliki potensi pasar yang baik, yaitu: hortikultura sayuran (brokoli, kubis

merah, petsai, caisin, cho putih, kubis tunas, bayam daun, labu siyam, oyong dan baligo. Buah: nangka, durian, salak, mangga, jeruk dan manggis), perkebunan (kelapa, pala, jambu mete, cengkeh, lada, vanili dan kopi), rempah dan obat (Jahe, kunyit, temulawak, dan temu-temuan lainnya), dan peternakan (susu, telur dan daging).

3.4. Pendekatan Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

Secara ideal pembangunan yang lestari membutuhkan pendekatan pencapaian terhadap keberlanjutan ataupun kesinambungan berbagai aspek kehidupan yang mencakup; keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta keberlanjutan pertahanan dan keamanan

1. Keberlanjutan Ekologis

Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan di bumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara dan seluruh kehidupan berkelanjutan. Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan yaitu ; daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya terpulihkan. ketiga untuk melaksanakan kegiatan yang tidak mengganggu integritas tatanan lingkungan yaitu hindarkan konversi alam dan modifikasi ekosistem, kurangi konversi lahan subur dan kelola dengan buku mutu ekologis yang tinggi, dan limbah yang dibuang tidak melampaui daya asimilatifnya lingkungan.

b. Memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman kehidupan yang menentukan keberlanjutan proses ekologis. Proses yang menjadikan rangkaian jasa pada manusia masa kini dan masa mendatang. Terdapat tiga aspek keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman genetika, spesies, dan tatanan lingkungan. Untuk mengkonversikan keanekaragaman hayati tersebut perlu hal-hal berikut yaitu “menjaga ekosistem alam dan area yang representatif tentang kekhasan sumberdaya hayati agar tidak dimodifikasikan, memelihara seluas mungkin area ekosistem yang dimodifikasikan untuk keanekaragaman dan keberlanjutan keanekaragaman spesies, konservatif terhadap konversi lahan Perkebunan”. Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan hal penting untuk keberlanjutan ekosistem. Hal ini dapat dilaksanakan melalui : pencegahan pencemaran lingkungan; rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dan sumberdaya alam yang rusak; meningkatkan kapasitas produksi dari ekosistem alam dan binaan manusia.

2. Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan memiliki dua hal utama keduanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan lainnya. Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal tersebut diatas dapat dicapai melalui kebijaksanaan makro ekonomi mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan domestik,

pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset.

3. Keberlanjutan Ekonomi Sektoral

Penyesuaian kebijakan yang meningkatkan keberlanjutan ekonomi makro secara jangka pendek akan mengakibatkan distorsi sektoral yang selanjutnya mengabaikan keberlanjutan ekologis. Hal ini harus diperbaiki melalui kebijaksanaan sektoral yang spesifik dan terarah. Oleh karena itu penting mengindahkan keberlanjutan aktivitas dan ekonomi sektoral. Untuk mencapai keberlanjutan ekonomi sektoral, berbagai kasus dilakukan terhadap kegiatan ekonomi. Pertama, sumberdaya alam yang nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang tangibbledalam kerangka akunting ekonomi, kedua, secara prinsip harga sumberdaya alam harus merefleksi biaya ekstaksi, ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatannya. Pakar ekonomi harus mengidentifikasi dan memperlakukan sumber daya sebagai sumber yang terpulih, tidak terpulihkan, dan lingkungan hidup. Sumber yang terpulihkan seperti hutan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bila tidak memperlakukan produktivitas ekonomi sebagai fungsi yang pasif atau jasa yang mengalir; menggunakan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan, sedangkan sumber yang tidak terpulihkan mempunyai jumlah absolut dan berkurang bila dimanfaatkan. Oleh karena itu pada kondisi seperti ini konsep sustainable yeild tidak boleh diterapkan. Pembangunan berkelanjutan dalam konteks sumberdaya yang tidak dapat dipulihkan berarti: pemanfaatan secara efisien sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi masa mendatang dan diupayakan agar dapat dikembangkan substitusi dengan sumberdaya terpulihkan; membatasi dampak lingkungan pemanfaatannya sekecil mungkin, karena sumberdaya lingkungan

adalah biosfer, secara menyeluruh sumberdaya ini tidak menciut akan tetapi berpariasi sesuai dengan kualitasnya.

4. Keberlanjutan Sosial Budaya

Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu:

- a. Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.
- b. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Halangan terhadap keberlanjutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita, khususnya di pedesaan.
- c. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu : prioritas harus diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk manfaat bersama, investasi pada perkembangan sumberdaya misalnya

meningkatkan status wanita, akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi harus berkelanjutan melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional dan desa, kota, perlu dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi sumber daya.

5. Keberlanjutan Politik

Keberlanjutan politik diarahkan pada respek pada *human right*, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial dan politik, demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggungjawab, kepastian kesediaan pangan, air, dan pemukiman.

6. Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan.

Keberlanjutan keamanan seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara dan bangsa perlu diperhatikan.

IV. PERKEBUNAN TRADISIONAL,KONVESIONAL DAN BERKELANJUTAN

4.1. Perkebunan Tradisional

Sistem Perkebunan tradisional adalah sistem Perkebunan yang masih bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input yang ada. Sistem Perkebunan tradisional salah satu contohnya adalah sistem ladang berpindah. Sistem ladang berpindah telah tidak sejalan lagi dengan kebutuhan lahan yang semakin meningkat akibat bertambahnya penduduk.

Perkebunan tradisional bersifat tak menentu. Keadaan ini bisa dibuktikan dengan kenyataan bahwa manusia seolah-olah hidup di atas tonggak. Pada daerah-daerah yang lahan Perkebunannya sempit dan penanaman hanya tergantung pada curah hujan yang tak dapat dipastikan, produk rata-rata akan menjadi sangat rendah, dan dalam keadaan tahun-tahun yang buruk, para petani dan keluarganya akan mengalami bahaya kelaparan yang sangat mencekam. Dalam keadaan yang demikian, kekuatan motivasi utama dalam kehidupan para petani ini barangkali bukanlah meningkatkan penghasilan, tetapi berusaha untuk bisa mempertahankan kehidupan keluarganya.

Pada Perkebunan tradisional biasanya lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani dan tidak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi petani, sehingga hasil keuntungan petani dari hasil Perkebunan tradisional tidak tinggi, bahkan ada yang sama sekali tidak ada dalam hasil produksi Perkebunan.

Sebenarnya Perkebunan tradisional merupakan Perkebunan yang akrab lingkungan karena tidak memakai pestisida. Akan tetapi produksinya tidak mampu mengimbangi kebutuhan pangan penduduk yang jumlahnya terus bertambah. Untuk mengimbangi kebutuhan pangan tersebut, perlu diupayakan peningkatan produksi yang kemudian berkembang sistem Perkebunan konvensional.

1. Perkebunan Tradisional berdasarkan fungsi dasar Ekonomi

Dalam Perkebunan tradisional biasanya menggunakan prinsip yang mana pertanian tradisional hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya sekarang, misalnya pada masyarakat bercocok tanam tanaman padi yang mana hasil padi yang telah di produksi dan diolah menjadi beras kemudian di konsumsi oleh keluarganya, sehingga terus berjalan kelangsungan hidupnya.

Kemudian ciri dari Perkebunan tradisional yaitu masih berpaku dan berharap pada alam yang mana ketika masyarakat menanam suatu tanaman dengan pertanian tradisional maka hasilnya akan tergantung pada proses alam.

Pada sistem Perkebunan terdapat beberapa evaluasi terhadap aspek ekonomi. Perkebunan tradisional jika dilihat dari aspek ekonomi antara lain:

a. Penggunaan teknologi yang belum berkembang.

Dalam hal ini biasanya pada Perkebunan tradisional menggunakan alat atau teknologi yang masih rendah atau belum berkembang. Yang mana hal ini dapat memperlambat hasil yang di produksi dan akan membuang waktu dalam proses bercocok tanam. Misalnya pada sistem tradisional masyarakat untuk membajak sawah masih menggunakan kerbau hal ini masih kurang efisiensi dalam pemanfaatan waktu dan tenaga. Akan tetapi dari sektor ekonominya lebih rendah dan minim pengulatan untuk mengelolah lahan untuk menghasilkan produk.

b. Tenaga kerja yang masih banyak di gunakan

Untuk Perkebunan tradisional biasanya digunakan lebih banyak dalam mengelolah lahan Perkebunan untuk menghasilkan produksi. hal ini dikarenakan masih minimnya teknologi yang ada sehingga pelaksanaan menggunakan SDM (sumber daya

manusia) yang ada. Sebagai contoh dalam hal panen tanaman tebu yang mana digunakan tenaga kerja manusia dalam proses penebangan, kemudian contoh lain proses perontokan helai padi yang masih menggunakan tenaga manusia untuk melakukan walaupun saat ini mulai ada teknologi yang membantu merontokan helai padi. Hal ini mencerminkan bahwa Perkebunan tradisional masih tergantung dengan Sumber Tenaga Manusia yang ada, akan tetapi dari sektor ekonominya lebih murah.

c. Modal yang dipakai masih sedikit

Dalam hal ini modal dalam pengelolaan produksi Perkebunan masih sedikit karena kebutuhan yang dibuat tidak terlalu membutuhkan modal lebih. Biasanya juga hanya butuh modal untuk pembayaran tenaga kerja dan lain-lain yang rata-rata minim.

d. Hasil produksi yang masih kurang terjangkau

Dalam Perkebunan tradisional sering hasil yang di produksi hanya sebatas untuk di konsumsi keluarga maupun masyarakat golongan. Hal ini dikarenakan masih minimnya cara budidaya tanaman sehingga produk yang dihasilkan masih rendah.

2. Perkebunan tradisional berdasarkan fungsi dasar Ekologi

Dalam Perkebunan tradisional untuk mengolah hasil produk Perkebunan masih tergantung dengan alam/ekologi sekitar. Dikarenakan dalam proses Perkebunan tradisional produknya hanya untuk memenuhi konsumsi petaninya, bukan untuk mencari keuntungan besar.

Adapun dampak positif yang terjadi dari pola perkebunan tradisional yaitu:

a. Pelestarian alam yang masih terjaga dan terus berkembang.

Pelestarian alam terus berjalan karena proses ini terjadi secara alami dan akan bisa memproduksi dengan rata-rata konstan untuk musim-musim kedepannya, tidak terjadi fluktuasi yang terlalu tinggi.

b. Tidak adanya kerusakan ataupun pencemaran yang terjadi .

Proses Perkebunan tradisional terjadi tanpa adanya kerusakan ekosistem yang ada sekitar maupun tanpa pencemaran yang bisa mengakibatkan penurunan hasil produktivitas pengolahan Perkebunan, karena perkebunan tradisional tidak menggunakan pupuk dari bahan kimia.

3. Perkebunan tradisional berdasarkan fungsi dasar Sosial

Dalam Perkebunan tradisional terjadi hubungan yang erat antar sesama dikarenakan dalam proses Perkebunan tradisional menjunjung tinggi tolong menolong dan gotong royong, apalagi dengan sistem tradisional yang menyebabkan antar petani saling membutuhkan dan membantu untuk menghasilkan produktivitas Perkebunan yang telah di olah.

4. Perkebunan Konvensional

Keadaan atau gambaran umum dari semua Perkebunan modern adalah titik beratnya pada salah satu jenis tanaman tertentu, menggunakan intensifikasi modal dan pada umumnya memproduksi dengan teknologi yang hemat tenaga kerja serta memperhatikan skala ekonomis yang efisien (*economies of scale*) yaitu dengan cara meminimumkan biaya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Untuk mencapai semua tujuan, Perkebunan modern praktis tidak berbeda dalam konsep atau operasinya dengan perusahaan industri yang besar. Sistem Perkebunan modern yang demikian itu sekarang ini dikenal dengan agri-bisnis.

Intensif merupakan cara bertani yang memanfaatkan inovasi teknologi dengan penggunaan input yang banyak dengan tujuan memperoleh output yang lebih tinggi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Perkebunan intensif dapat disebut sebagai Perkebunan modern. Ciri Perkebunan Modern (Intensif) adalah penggunaan bibit unggul, aplikasi pupuk buatan, pestisida, penerapan mekanisasi Perkebunan

dan pemanfaatan air irigasi. Sistem Perkebunan ini mengkonsumsi sumberdaya alam yang tak terbarui dalam jumlah besar seperti minyak dan gas bumi, fosfat dan lain-lain, sehingga butuh modal yang besar pula. Sistem Perkebunan seperti ini telah berkembang sedemikian rupa di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia dan dirasakan sangat bermanfaat dalam rangka peningkatan produksi berbagai komoditas Perkebunan guna memenuhi kebutuhan manusia. Hasil kemajuan teknologi melalui Perkebunan modern begitu spektakuler dan mengesankan, sehingga fenomena tersebut dipandang sebagai "Revolusi Hijau"

5. Perkebunan Konvensional Berdasarkan Fungsi Dasar Ekonomi

Dalam Perkebunan modern (spesialisasi), pengadaan pangan untuk kebutuhan sendiri dan jumlah surplus yang bisa dijual, bukan lagi merupakan tujuan pokok. Keuntungan (profit) komersial murni merupakan ukuran keberhasilan dan hasil maksimum per hektar dari hasil upaya manusia (irigasi, pupuk, pestisida, bibit unggul, dan lain-lain) dan sumber daya alam merupakan tujuan kegiatan Perkebunan. Pada sistem Perkebunan konvensional terdapat beberapa evaluasi terhadap aspek ekonomi. Perkebunan konvensional jika dilihat dari aspek ekonomi antara lain:

a. Penurunan lapangan kerja dan peningkatan pengangguran

Dalam sistem Perkebunan konvensional digunakan teknologi dan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Dengan digunakannya teknologi, kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh petani digantikan oleh mesin yang berteknologi tinggi. Sehingga para petani lambat laun mulai banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyaknya petani yang tidak bekerja dapat meningkatkan angka pengangguran. Lapangan pekerjaan untuk petanipun berkurang karena semua kegiatan bertani dapat dilakukan oleh mesin.

b. Peningkatan kemiskinan dan malnutrisi di pedesaan

Petani yang pekerjaannya telah digantikan oleh mesin akan menjadi pengangguran dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Karena itu, kemiskinan semakin meningkat dan banyak anak-anak yang mengalami malnutrisi karena kekurangan makan. Hal tersebut terjadi kebanyakan di daerah pedesaan, karena kebanyakan petani pedesaan adalah petani dengan modal kecil.

c. Pengeluaran lebih banyak

Dengan penggunaan teknologi, sudah pasti biaya produksi akan lebih tinggi karena mesin-mesin harus dibeli dengan biaya yang tinggi. Selain itu, pengadaan benih berkualitas tinggi juga sangat mahal. Pemberian pupuk dan pemberantasan hama menggunakan zat kimia juga akan menambah biaya produksi.

d. Mendapatkan penghasilan lebih banyak atau untung

Hasil produksi dari sistem Perkebunan konvensional lebih banyak daripada Perkebunan organik. Dengan hasil yang banyak tersebut, petani konvensional akan mendapat untung yang banyak dari hasil penjualan produk Perkebunannya. Hanya bisa dilakukan petani dengan modal besar. Sebagian besar yang melakukan sistem Perkebunan konvensional adalah petani dengan modal besar karena biaya produksi yang digunakan untuk membeli mesin, bahan tanam yang berkualitas tinggi, serta pestisida maupun pupuk kimia memerlukan biaya yang cukup besar.

e. Berorientasi pada pasar ekspor dan lokal

Pada sistem Perkebunan konvensional, produk hasil diorientasikan pada pasar lokal dan ekspor. Hasil yang banyak selain dapat memenuhi kebutuhan lokal juga dapat dijual di pasaran ekspor. Para petani banyak yang menjual hasil Perkebunannya di pasar ekspor karena harga jualnya tinggi.

f. Mempunyai resiko produksi yang tinggi

Sistem Perkebunan konvensional mempunyai resiko produksi yang tinggi karena biaya yang dikeluarkan untuk produksi sangat besar. Apabila pada proses produksi terjadi kegagalan misalnya seperti kerusakan mesin ataupun gagal panen tentunya resiko biaya produksi tidak kembali sangat besar. Dan petani akan mengalami kerugian.

4.2. Perkebunan Konvensional Secara Fungsi Dasar Ekologi

Penerapan Perkebunan konvensional pada tahap-tahap permulaan mampu meningkatkan produktivitas Perkebunan dan pangan secara nyata, namun kemudian efisiensi produksi semakin menurun karena pengaruh umpan balik berbagai dampak samping yang merugikan. Bila kita terapkan prinsip ekonomi lingkungan dengan menginternalisasikan biaya lingkungan dalam perhitungan neraca ekonomi suatu usaha dan program pembangunan Perkebunan maka yang diperoleh pengusaha dan negara adalah kerugian besar. Perhitungan GNP dan GDP yang dilakukan Pemerintah saat ini sebenarnya tidak realistis. Sayangnya biaya lingkungan jarang dimasukkan sepenuhnya dalam perhitungan neraca usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penelitian terhadap perkebunan secara konvensional dengan biasanya pada lahan-lahan yang berpotensi tinggi, tanaman ekspor dan petani yang lebih mampu, telah memberikan hasil yang tidak terjangkau oleh sebagian besar petani. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Penurunan kesuburan tanah dan kehilangan bahan organik tanah

Pada sistem Perkebunan konvensional, lahan yang digunakan dapat mengalami penurunan kesuburan tanah dan kehilangan bahan organik. Hal tersebut terjadi karena seringnya penggunaan pupuk kimia ataupun bahan-bahan kimia lain seperti pestisida yang

lama-kelamaan akan merusak kesuburan tanah dan mematikan organisme-organisme yang hidup di dalam tanah.

b. Peningkatan pencemaran air dan tanah akibat pupuk kimia, pestisida, limbah domestik

Perkebunan konvensional adalah Perkebunan dengan menggunakan bahan-bahan kimia maupun alat-alat modern. Karena hal tersebut jika Perkebunan konvensional dilakukan secara terus menerus akan menyebabkan peningkatan pencemaran air dan tanah akibat pupuk kimia, pestisida, dan limbah domestik.

c. Residu pestisida dan bahan-bahan berbahaya lain di lingkungan dan makanan yang mengancam kesehatan masyarakat dan penolakan pasar

Penggunaan bahan-bahan kimia pada pupuk maupun pestisida pada sistem Perkebunan konvensional menyebabkan pencemaran lingkungan. Produk-produk yang dihasilkan kurang terjamin kebersihannya dan kelayakannya untuk dikonsumsi karena sudah terkena zat kimia. Oleh karena itu, masyarakat mulai berpikir ulang untuk mengonsumsi produk yang tercemar oleh zat kimia.

d. Kontribusi dalam proses pemanasan global

Sebagian besar Perkebunan konvensional selalu menggunakan teknologi tinggi yang tidak ramah lingkungan. Akibatnya banyak terjadi pencemaran air dan pencemaran udara. Hal tersebut akan berkontribusi dalam proses pemanasan global.

e. Eksploitasi unsur hara

Integrasi usaha tani ke dalam pasar nasional maupun internasional menimbulkan suatu penghabisan unsur hara netto jika unsur hara yang diambil tidak dapat dikembalikan lagi. Sangat sedikit teknologi yang dikembangkan untuk mengembalikan unsur hara dari daerah/lokasi konsumen ke daerah produsen.

4.3. Perkebunan Konvensional Secara Fungsi Dasar Sosial

Masyarakat Indonesia umumnya bertani dengan memperhatikan keadaan sosial disekitarnya. Apabila menggunakan sistem Perkebunan konvensional, tidak ada lagi kearifan tradisional dan kebanyakan tanaman yang ditanam adalah tanaman yang sedang naik daun atau tanaman yang dibutuhkan sangat banyak dan berdaya jual tinggi. Sehingga tanaman-tanaman lokal tidak dapat bersaing karena sedikit sekali petani yang menanamnya.

a. Peningkatan kesenjangan sosial dan jumlah petani gurem di desa.

Jika di suatu desa digunakan sistem Perkebunan konvensional dapat terjadi peningkatan kesenjangan sosial di antara para petani. Hal itu disebabkan karena hanya petani yang bermodal besar yang dapat menjalankan sistem ini sedangkan petani dengan modal kecil tidak akan mampu membeli mesin dan bahan tanam seperti petani konvensional. Oleh karena itu Perkebunan konvensional akan dapat meningkatkan kesenjangan sosial terutama di daerah pedesaan.

b. Ketergantungan petani pada pemerintah dan perusahaan/industri agrokimia

Karena dibutuhkan modal yang sangat besar, para petani konvensional membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam hal modal dan informasi-informasi terbaru tentang Perkebunan. Petani juga akan mengalami ketergantungan dengan perusahaan/industri agrokimia, karena kebanyakan mereka menggunakan bahan-bahan kimia.

c. Rasa kekeluargaan dan kekompakan antar petani berkurang

Perkebunan konvensional lebih menggunakan mesin daripada tenaga manusia atau petani. Hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya rasa kekeluargaan dan kekompakan antar petani. Padahal hal tersebut sangat berbahaya karena petani bisa-bisa bersaing secara tidak sehat.

d. Pengabaian pengetahuan lokal petani

Pendekatan konvensional dari atas ke bawah pada pengembangan teknologi dalam lembaga penelitian Perkebunan hanya memberikan sedikit kesempatan pada ilmuwan untuk lebih mengenal kondisi. Situasi ini tidak dibenahi oleh sikap umum dari para penyuluh dan peneliti yang telah mendapatkan ilmu di universitas maupun sekolah, bahwa sistem pendidikan formal merupakan sumber utama inovasi dan bahwa informasi hanya bisa datang dari atas.

e. Penekanan pada penelitian

Kondisi produksi lembaga penelitian dan tempat percobaan tidak mencerminkan kondisi petani dan tidak mungkin mewakili kondisi Perkebunan tadah hujan yang sangat beragam. Akibatnya, teknologi yang di uji di tempat [percobaan seringkali tidak bisa diterapkan dengan kondisi petani, sementara kualitas varietas lokal yang baik, yang disesuaikan dengan kondisi lokal, tidak diakui dalam tempat percobaan.

4.4. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Perkebunan Kelapa sawit berkelanjutan bertujuan untuk memutus ketergantungan petani terhadap input eksternal dan penguasa pasar yang mendominasi sumber daya agraria. Perkebunan berkelanjutan merupakan tahapan penting dalam menata ulang struktur agraria dan membangun sistem ekonomi Perkebunan yang sinergis antara produksi dan distribusi dalam kerangka pembaruan agraria.

Pelaksanaan Perkebunan Kelapa sawit berkelanjutan bersumber dari tradisi Perkebunan keluarga yang menghargai, menjamin dan melindungi keberlanjutan alam untuk mewujudkan kembali budaya Perkebunan sebagai kehidupan. Oleh karena itu, SPI mengistilahkannya sebagai "Perkebunan berkelanjutan berbasis keluarga petani", untuk

membedakannya dengan konsep Perkebunan organik berhaluan agribisnis. Perkebunan berkelanjutan merupakan tulang punggung bagi terwujudnya kedaulatan pangan (Serikat Petani Indonesia, 2008)

Perkebunan Kelapa sawit berkelanjutan meliputi komponen-komponen fisik, biologi dan sosioekonomi. Perkebunan berkelanjutan direpresentasikan dengan sistem Perkebunan yang melaksanakan pengurangan input bahan-bahan kimia, mengendalikan erosi tanah dan gulma, serta memelihara kesuburan tanah.

Perkebunan Kelapa sawit berkelanjutan memiliki konsep dasar yaitu mempertahankan ekosistem alami lahan Perkebunan yang sehat, bebas dari bahan-bahan kimia yang meracuni lingkungan. Dalam Perkebunan keberlanjutan terdapat komponen dasar agroekosistem baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dimana komponen dasar agroekosistem tersebut memadukan antara produktivitas (*productivity*), stabilitas (*Stability*), Pemerataan (*equility*).

Perkebunan Kelapa sawit berkelanjutan merupakan suatu ajakan moral untuk berbuat kebijakan pada lingkungan Sumber Daya Alam dalam usaha Perkebunan dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu:

- a. **Kesadaran Lingkungan (*Ecologically Sound*)**, sistem budidaya Perkebunan tidak boleh menyimpang dari sistem ekologis yang ada. Keseimbangan lingkungan adalah indikator adanya harmonisasi dari sistem ekologis yang mekanismenya dikendalikan oleh hukum alam.
- b. **Bernilai ekonomis (*Economic Valueable*)**, sistem budidaya Perkebunan harus mengacu pada pertimbangan untung rugi, baik bagi diri sendiri dan orang lain, untuk jangka pendek dan jangka panjang, serta bagi organisme dalam sistem ekologi maupun diluar sistem ekologi. Sumber daya alam terlanjutkan (tidak tereksplorasi).
- c. **Berwatak sosial atau kemasyarakatan (*Socially Just*)**, sistem Perkebunan harus selaras dengan norma-norma sosial dan budaya

yang dianut dan di junjung tinggi oleh masyarakat setempat. (Lisa navita)

4.5. Perkebunan Berkelanjutan Secara Fungsi Dasar Ekonomi

Penerapan Perkebunan organik, memberikan manfaat bagi masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat antara lain :

a. Produksi Perkebunan organik jauh dibawah hasil produksi sistem konvensional

Adanya perbedaan hasil ini mencerminkan adanya perbedaan teknik bercocok tanam dan pengalaman petani. Industri pangan organik berkembang sangat cepat sementara petani belum mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menerapkan sistem Perkebunan organik yang benar. Perbedaan hasil juga seringkali bergantung pada jenis tanaman yang diusahakan. Beberapa hasil penelitian di kawasan Timur Canada menunjukkan bahwa hasil gandum organik adalah 75% lebih rendah dibanding dengan gandum konvensional. Pada kasus cuaca yang tidak normal, misalnya musim kering yang panjang, maka produktivitas Perkebunan organik biasanya lebih tinggi dibanding Perkebunan konvensional. Di samping itu, Perkebunan organik juga relatif lebih tahan terhadap gangguan hama dan penyakit.

b. Minimnya akses transportasi pada lokasi-lokasi yang memenuhi syarat untuk budidaya Perkebunan organik

Minimnya akses transportasi disebabkan karena daerah yang memenuhi syarat untuk budidaya Perkebunan organik adalah daerah yang minim pencemaran lingkungan. Hal ini menimbulkan beberapa implikasi lanjutan antara lain : (a). sulitnya mendistribusikan bahan input atau sarana produksi Perkebunan seperti pupuk dan pestisida organik, benih, dan peralatan kerja; (b). sulitnya membawa hasil/produk Perkebunan organik dari lahan ke pasar; (c). mahal nya

biaya untuk transportasi dari dan ke lokasi budidaya Perkebunan organik.

c. Perkebunan berkelanjutan memerlukan biaya produksi relatif lebih rendah dibandingkan Perkebunan konvensional.

Khususnya untuk penyediaan input produksi Perkebunan konvensional memiliki biaya produksi lebih tinggi daripada Perkebunan berkelanjutan. Dalam Perkebunan berkelanjutan pembelian pupuk dan pestisida sintetis tidak diperlukan lagi. pengendalian gulma dilakukan secara mekanis. Pengolahan tanah untuk pengendalian gulma setelah tanaman tumbuh dilakukan dengan cara minimal. Banyak orang berpendapat bahwa pengendalian gulma akan meningkatkan frekuensi pengolahan tanah dan juga biaya. Dalam prakteknya, ternyata tidaklah demikian. Dengan perbaikan struktur tanah dan praktek pengelolaan yang baik, Perkebunan berkelanjutan justru meminimalkan pengolahan tanah, atau lebih sedikit, dibanding Perkebunan konvensional.

d. Pendapatan petani berkelanjutan sedikit lebih besar dibanding dengan petani konvensional.

Secara umum, biaya produksi lebih rendah dan pendapatan lebih besar (karena *premium price*). Industri organik berubah sangat cepat sehingga mempengaruhi ketidakstabilan harga. Sebagai contoh, adanya harga tinggi pada satu jenis komoditi telah mendorong banyak petani menanam komoditi yang sama secara bersamaan. Ini menyebabkan harga turun ketika musim panen. Banyak orang berpendapat bahwa sejalan dengan waktu *premium price* akan stabil. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani, sebagai contoh biaya pembelian pupuk organik lebih murah dari biaya pembelian pupuk kimia; Harga jual hasil Perkebunan organik seringkali lebih mahal. Contoh, harga beras organik saat ini Rp. 8.000 – 13.000,-/kg

sedang beras biasa Rp. 5.500 – 7.000,-/kg; Petani dan peternak bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari penjualan jerami dan kotoran ternaknya; Bagi peternak, biaya pembelian pakan ternak dari hasil fermentasi bahan organik lebih murah dari pakan ternak konvensional; Pengembangan Perkebunan organik berarti memacu daya saing produk agribisnis Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar internasional akan produk Perkebunan organik yang terus meningkat. Ini berarti akan mendatangkan devisa bagi pemerintah daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani.

e. Menciptakan lapangan kerja baru dan keharmonisan kehidupan sosial di pedesaan.

Perkebunan berkelanjutan akan merangsang hadirnya industri kompos rakyat yang berarti adanya lapangan kerja baru bagi masyarakat pedesaan. Disamping itu, penerapan Perkebunan berkelanjutan juga akan merangsang adanya kerjasama kemitraan antara petani peternak-pekebun untuk menerapkan sistem Perkebunan terpadu. Dalam hubungan ini, peternak mendapatkan bahan makanan ternak dari limbah Perkebunan (jerami dan dedak, misalnya) dari petani, sedangkan petani mendapatkan kotoran hewan dari peternak sebagai bahan kompos untuk usaha Perkebunan organiknya. Hal ini secara langsung akan menciptakan keharmonisan kehidupan sosial di pedesaan.

4.6. Perkebunan Berkelanjutan Secara Fungsi Dasar Ekologi

Prinsip ekologi dalam penerapan Perkebunan organik dapat dipilahkan sebagai berikut:

1. Memperbaiki kondisi tanah

Dengan menggunakan sistem Perkebunan berkelanjutan, tanah yang rusak dapat diperbaiki sehingga menguntungkan pertumbuhan

tanaman, terutama pengelolaan bahan organik dan meningkatkan kehidupan biologi tanah.

2. Optimalisasi ketersediaan dan keseimbangan daur hara

Jika menggunakan sistem Perkebunan berkelanjutan ketersediaan dan keseimbangan daur hara dapat dioptimalisasi melalui fiksasi nitrogen, penyerapan hara, penambahan dan daur pupuk dari luar usaha tani.

3. Membatasi kehilangan hasil panen akibat aliran panas, udara dan air dengan cara mengelola iklim mikro, pengelolaan air dan pencegahan erosi.

4. Membatasi terjadinya kehilangan hasil panen akibat hama dan penyakit dengan melaksanakan usaha preventif melalui perlakuan yang aman.

5. Pemanfaatan sumber genetika (plasma nutfah) yang saling mendukung dan bersifat sinergisme dengan cara mengkombinasikan fungsi keragaman sistem Perkebunan terpadu.

6. Menjaga sifat fisik, kimia dan biologi tanah

Dalam Perkebunan berkelanjutan diutamakan cara pengelolaan tanah yang meminimalkan erosi, meningkatkan kandungan bahan organik tanah serta mendorong kuantitas dan diversitas biologi tanah. Dalam Perkebunan organik peningkatan kesuburan tanah dilakukan tanpa menggunakan pupuk kimia sintetis. Sebagai gantinya digunakan teknik-teknik seperti rotasi tanaman secara tepat, *mixed cropping* dan integrasi tanaman dengan ternak, meminimalkan pengolahan tanah yang mengganggu aktivitas biota tanah, menggunakan tanaman dalam strip dan tumpang sari.

7. Penghematan energi

Hasil studi menunjukkan bahwa sistem produksi organik hanya menggunakan 50–80% energi minyak untuk menghasilkan setiap unit pangan dibandingkan dengan sistem produksi Perkebunan konvensional. Namun demikian, ini tidak berlaku untuk semua sistem produksi sayuran dan buah-buahan.

8. Tidak mencemari air

Penjagaan kualitas air merupakan upaya yang sangat penting dalam sistem Perkebunan lestari (*sustainable agriculture system*). Kenyataan menunjukkan bahwa polusi air tanah (*groundwater*) dan air muka tanah (*surface water*) oleh nitrat dan fosfat menjadi hal yang umum terjadi di kawasan Perkebunan. Residu pupuk dan pestisida sintetis serta bakteri penyebab penyakit seperti *Escherichia Coli* juga seringkali terdeteksi di sistem perairan.

Pada areal Perkebunan organik, sumber air dijaga dengan menghindari praktek-praktek Perkebunan yang menyebabkan erosi tanah dan pencucian nutrisi, pencemaran air akibat penggunaan bahan kimia. Kotoran hewan yang akan digunakan untuk pupuk organik selalu dikelola dengan hati-hati dan dikomposkan sebelum digunakan. Di samping itu, penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis juga dilarang dalam sistem Perkebunan organik.

9. Tidak mencemari udara

Perkebunan berkelanjutan terbukti mampu meminimalkan perubahan iklim global karena emisi gas rumah kaca (*greenhouse gas emission*) pada Perkebunan organik lebih rendah dibandingkan Perkebunan konvensional. Dalam Perkebunan organik tidak menggunakan pupuk nitrogen sintetis sehingga tidak ada emisi nitrogen oksida dari pupuk buatan tersebut. Penggunaan minyak bumi juga lebih rendah sehingga menurunkan emisi gas karbon dioksida. Lebih penting lagi, Perkebunan organik menyediakan penampungan (*sink*) untuk karbon dioksida melalui peningkatan kandungan bahan organik di tanah serta penutupan permukaan tanah dengan tanaman penutup tanah.

10. Dapat memanfaatkan limbah

Praktek Perkebunan berkelanjutan mengurangi jumlah limbah melalui daur ulang limbah menjadi pupuk organik. Kotoran ternak, jerami dan limbah Perkebunan lainnya yang selama ini dianggap limbah, justru

menjadi bahan yang mempunyai nilai sebagai sumber nutrisi dan bahan organik bagi Perkebunan organik.

11. Menciptakan keanekaragaman hayati

Perkebunan organik tidak hanya menghindari penggunaan pestisida sintetis, namun juga mampu menciptakan keanekaragaman hayati. Praktek seperti rotasi pertanaman, tumpang sari serta pengolahan tanah konservasi merupakan hal-hal yang mampu meningkatkan keanekaragaman hayati dengan menyediakan habitat yang sehat bagi banyak spesies mulai dari jamur mikroskopis hingga binatang besar. Perkebunan organik tidak menggunakan organisme hasil rekayasa genetika (*Genetic Engineering Organism*) atau organisme transgenik (*Genetically Modified Organism*) serta produknya karena alasan keamanan lingkungan, kesehatan dan sosial. Produk-produk seperti ini tidak dibutuhkan karena mungkin menyebabkan resiko yang tidak dapat diterima pada integritas spesies.

4.7. Perkebunan Berkelanjutan Secara Fungsi Dasar Sosial

1. Menghasilkan makanan yang cukup, aman dan bergizi sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pada sistem Perkebunan berkelanjutan, tidak digunakan pupuk kimia secara berlebihan sehingga produk-produk yang dihasilkan layak konsumsi dan aman serta bergizi bagi masyarakat.

2. Kebutuhan dasar seluruh masyarakat terpenuhi

Dengan menerapkan sistem Perkebunan berkelanjutan, hasil produksi yang di dapat stabil sehingga seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

3. Segala bentuk kehidupan dihargai

Manusia hidup di dunia tidak sendiri, melainkan berdampingan dengan hewan dan tumbuhan. Dengan menerapkannya sistem Perkebunan berkelanjutan, manusia, hewan, dan tumbuhan dan

bekerjasama dengan baik dan semua berperan dalam menghadapi hidup. Sehingga semua bentuk kehidupan dapat dihargai.

4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani.

Dengan digunakannya sistem Perkebunan berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani. Hal ini dikarenakan petani akan terhindar dari paparan (*exposure*) polusi yang diakibatkan oleh digunakannya bahan kimia sintetis dalam produksi Perkebunan.

4.8. Implementasi RSPO dan ISPO

1. Sejarah RSPO

Sebagaimana diketahui dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran pasar (*market*) minyak nabati dunia, dari sebelumnya didominasi konsumsi minyak kedelai yang diproduksi di negara maju (Eropa) menjadi minyak sawit yang diproduksi di negara berkembang (Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Nigeria, Ghana dll). Dari sisi suplai tahun 2007, pasokan produksi Indonesia menjadi yang terbesar (44%) menggeser pasokan Malaysia (41%) untuk konsumsi minyak sawit dunia. Harga minyak mentah (*crude oil*) yang naik di luar perkiraan juga membuat minyak sawit selalu menjadi pembicaraan sebagai substitusi dalam bentuk biofuel.

Saat ini perkebunan kelapa sawit diarahkan bagaimana meningkatkan kredibilitas produknya dari sisi pengelolaan sistem keberlanjutan (*sustainability*). Seiring itu, beberapa tahun lalu, diperkenalkan prinsip dan kriteria RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*). Puluhan perusahaan di Indonesia mendapat sertifikasi itu walaupun sifat pemenuhan RSPO adalah sukarela (*voluntary*). RSPO adalah standar yang dibuat berdasarkan kesepakatan/*roundtable* para pemangku kepentingan seperti konsumen, produsen dan LSM lingkungan internasional. RSPO yang

bersekretariat di Kuala Lumpur ini menjadi wadah komunikasi para pihak berkepentingan untuk menyamakan persepsi tentang konsep keberlanjutan (sustainability).

2. Pedoman ISPO

Dalam launching ISPO di Medan satu tahun lalu, pemerintah menekankan bahwa Sertifikasi ISPO bukanlah untuk mengganti/menyaingi Sertifikasi RSPO. Prinsip dan kriteria ISPO muncul sebagai inisiatif dari pemerintah atas kesadaran/deklarasi bahwa pengelolaan sumberdaya alam termasuk perkebunan kelapa sawit harus dilakukan secara berkelanjutan (sustainable).

Dalam hal terbitnya pedoman ISPO, Menteri Pertanian menyatakan sebagai amanat konstitusi UUD pasal 33 ayat 3, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Secara garis besar, pedoman ISPO didasarkan pada 4 hal, yaitu **kepatuhan hukum, kelayakan usaha, pengelolaan lingkungan dan hubungan sosial** yang dirumuskan dalam prinsip prinsip sebagai berikut: 1) sistem perijinan dan manajemen perkebunan; 2) penerapan pedoman teknis budi daya dan pengolahan kelapa sawit; 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 4) tanggungjawab terhadap pekerja; 5) tanggung jawa sosial dan komunitas; 6) pemberdayaan ekonomi masyarakat; 7) peningkatan usaha secara berkelanjutan. Ketujuh prinsip itu dirinci ke dalam 27 kriteria dan 117 indikator yang lengkapnya dapat dilihat pada Permentan No 19/2011.

Di banyak perkebunan negara dan swasta besar, berdasarkan pengalaman kami pemenuhan terhadap prinsip

tersebut sudah relatif memadai kecuali dalam beberapa kriteria, yaitu mekanisme penanganan sengketa lahan dan kompensasi, mekanisme pemberian informasi, pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity), identifikasi kawasan yang mempunyai Nilai Konservasi Tinggi (NKT), mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan realisasi tanggung jawab sosial perusahaan. Sedang untuk prinsip-prinsip lainnya hanya perlu perbaikan dokumentasi agar pemenuhan buktinya dapat ditunjukkan dan konsisten.

3. Persiapan Sertifikasi ISPO

Seperti juga sistem-sistem lain seperti ISO 9000, 14000 dan SMK3, sebelum mengajukan sertifikasi, perlu melakukan pembenahan di internal perusahaan. Langkah-langkah yang dapat digunakan adalah: 1) melakukan pelatihan pemahaman prinsip dan kriteria ISPO kepada beberapa staf yang dipersiapkan sebagai tim internal; 2) para personal yang terlatih melakukan analisa kesenjangan (*Gap Analysis*) untuk menguji tingkat pemenuhan perusahaan terhadap ISPO pada tahap awal; 3) perusahaan melakukan perbaikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan. 4), setelah perbaikan dianggap sudah memenuhi, perusahaan mengajukan sertifikasi kepada badan sertifikasi sesuai pilihannya. Ruang lingkup yang disertifikasi adalah kebun sendiri dan pabrik kelapa sawit (PKS), perusahaan berkewajiban mensosialisasikan ISPO kepada para pemasok TBS dari perkebunan lain jika menerima TBS selain kebun sendiri. Masa sertifikat ISPO berlaku selama 5 tahun sebelum dilakukan penilaian ulang (*re-assessment*) dan sekali dalam setahun dilakukan audit pengawasan (*surveillance*).

Akhirnya, yang menjadi kunci utama suksesnya implementasi ISPO ini adalah komitmen pemilik/top manajemen perkebunan. Strategi tersebut di atas hanya bisa berjalan efektif jika pemilik/top manajemen mempunyai komitmen penuh untuk memenuhi ISPO.

Maka ke depan kita dengan bangga mengatakan kepada dunia bahwa semua minyak sawit Indonesia adalah minyak sawit lestari, perkebunan minyak sawit yang dikelola dengan mematuhi hukum, melaksanakan praktek perkebunan terbaik serta memperhatikan lingkungan dan sosial.

Ujian sesungguhnya program ini tetap pada penerimaan pasar (*market acceptance*), beberapa tahun ke depan Indonesia akan melihat respon konsumen terhadap konsep pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan yang diprakarsai Indonesia ini.

|

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Perkebunan Kelapa sawit berkelanjutan merupakan pola pengelolaan sumberdaya alam yang tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan serta konservasi sumberdaya alam. Perkebunan berwawasan lingkungan selalu memperhatikan tanah, air, manusia, hewan/ternak, makanan, pendapatan dan kesehatan.
2. Pengelolaan perkebunan Kelapa sawit berkelanjutan merujuk pada pemikiran untuk memberikan focus perhatian pada aspek lingkungan, sosial budaya dan hukum. a). **Pada Aspek lingkungan**, efisiensi dan keberlangsungan sumberdaya alam bagi generasi yang akan datang menjadi sangat penting, sehingga pembangunan perkebunan di Provinsi Jambi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan dan memelihara kelestarian sumberdaya alam; b). **Pada aspek ekonomi**, investasi usaha perkebunan harus menciptakan kesinambungan usaha dengan meminimalisir konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan; c). **Pada aspek sosial budaya**, perhatian difokuskan pada tanah adat, nilai budaya yang merupakan identitas masyarakat, serta hubungan antara masyarakat dan pengusaha perkebunan yang memberi ruang bagi negosiasi bagi kepentingan kedua belah pihak, minimal 20% atau lebih sesuai dengan kesepakatan dari jumlah areal Perkebunan Besar diperuntukkan untuk perkebunan rakyat; d). **Pada aspek hukum** hendaknya mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa yang dimulai dari ijin prinsip hingga dikeluarkannya Hak Guna Usaha; Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan situasi usaha yang kondusif dan menjamin kepastian

hukum bagi pembangunan perkebunan di Provinsi Jambi, pada masa yang akan datang.

3. Sub-sektor perkebunan merupakan subsektor yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sekitar 18% terhadap total PDRB Provinsi Jambi. Adapun permasalahan mendasar yang dihadapi dalam usaha perkebunan, di Provinsi Jambi, pada umumnya hampir sama seperti permasalahan yang terjadi di Provinsi tetangga, diantaranya: a) Bibit tanaman masih ada yang palsu, b) Pemupukan kurang, c) Lahan tidak sesuai, d). Kurangnya pengetahuan petani, e) Banyak tanaman tua
4. Pedoman ISPO didasarkan pada 4 hal, yaitu **kepatuhan hukum, kelayakan usaha, pengelolaan lingkungan dan hubungan sosial** yang dirumuskan dalam prinsip prinsip sebagai berikut: 1) sistem perijinan dan manajemen perkebunan; 2) penerapan pedoman teknis budi daya dan pengolahan kelapa sawit; 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 4) tanggungjawab terhadap pekerja; 5) tanggung jawa sosial dan komunitas; 6) pemberdayaan ekonomi masyarakat; 7) peningkatan usaha secara berkelanjutan.
5. Kunci utama suksesnya implementasi ISPO ini adalah komitmen pemilik/top manajemen perkebunan. Strategi tersebut di atas hanya bisa berjalan efektif jika pemilik/top manajemen mempunyai komitmen penuh untuk memenuhi ISPO. Maka pada masa yang akan datang, Indonesia dengan bangga mengatakan kepada dunia bahwa semua minyak sawit Indonesia adalah minyak sawit lestari, perkebunan minyak sawit yang dikelola dengan mematuhi hukum, melaksanakan praktek perkebunan terbaik serta memperhatikan lingkungan dan sosial.

5.2. Saran

1. Dalam rangka menangani permasalahan rendahnya pengetahuan petani dalam melaksanakan usaha budidaya perkebunan Kelapa sawit, maka disarankan agar pemerintah kabupaten/kota, meningkatkan fungsi PPL (Petugas Pertanian Lapangan) untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di tingkat lapangan.
2. Mengingat para petani belum sepenuhnya bisa membiayai program replanting, maka perlu ditingkatkan sinergitas atau keterpaduan, antara program dari Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi serta Dinas yang menangani perkebunan di kabupaten/kota, terutama dalam upaya melakukan program replanting.
3. Bagi petani yang sudah tergabung dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Pertanian), maka disarankan untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya dapat membentuk koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim, 2012. Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Karet Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2012. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
2. Anonim, 2013. Realisasi Penyaluran Bibit Karet Klon Anjuran, Pupuk dan Obat-obatan. Kegiatan Peremajaan Karet Rakyat Provinsi Jambi.
3. Anonim, 2017. Statistik Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2017 Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi bekerja sama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
4. Anonim, 2013. Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Gas Rumah Kaca. Bappeda Provinsi Jambi.
5. Barus, E., 2003. Pengendalian gulma di perkebunan. Kanisius, Yogyakarta.
6. Djajadinigrat, 2001 Untuk Generasi Masa Depan: "Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan Lingkungan", ITB.
7. Elang Lilik, 2003 Kumpulan Makalah Perubahan Lingkungan Global dan kerjasama Internasional, IPB